

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

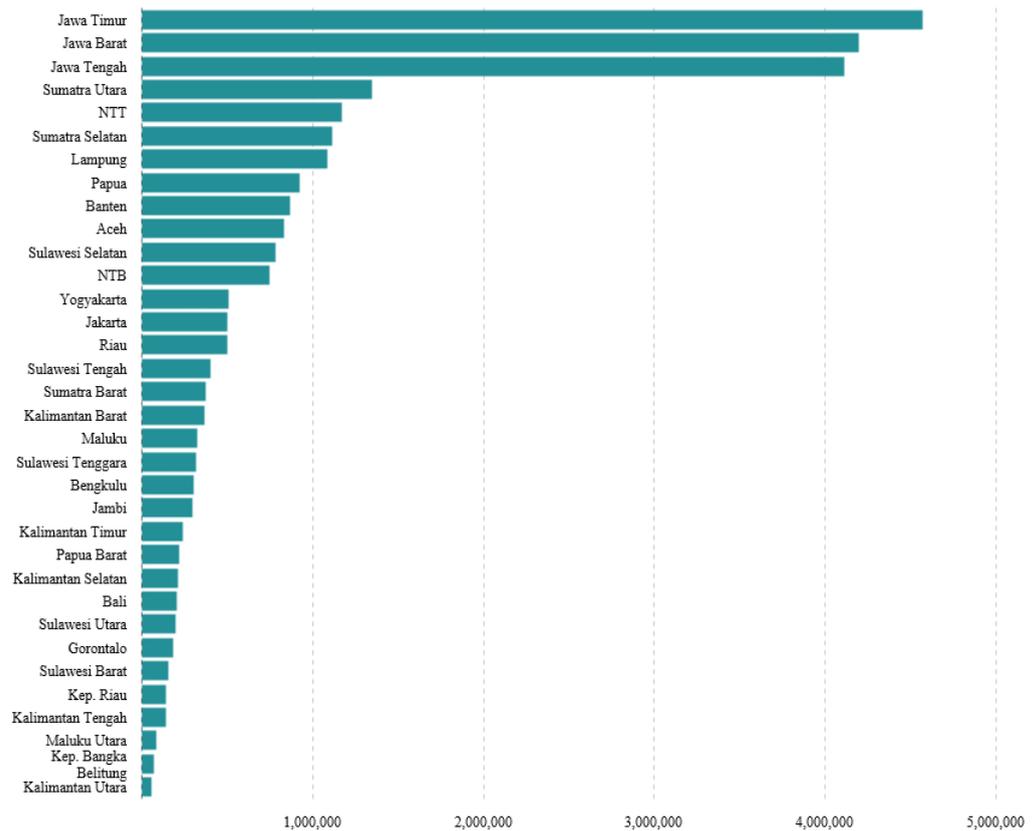
#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pokok yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Walaupun berbeda-beda tingkat dan jumlahnya, tidak ada satu negara yang dapat terbebas dari masalah kemiskinan. Baik di negara maju yang kaya dalam bidang industri juga mengalami kemiskinan meski jumlahnya tidak besar. Masalah kemiskinan ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di kota Malang yang dimana membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Maka perlu adanya upaya dan perhatian khusus dari pemerintah khususnya pemerintah kota Malang untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut melalui program bantuan sosial dengan harapan agar masalah kemiskinan dapat teratasi dan masyarakat dapat hidup yang lebih layak.

Berikut ini data tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan badan pusat statistik presentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. (Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

**Gambar 1.1**

**Tingkat Kemiskinan per Provinsi di Indonesia, Maret 2021**



*Sumber : BPS (Tingkat Kemiskinan per Provinsi 2021)*

Kemudian untuk di kota Malang presentase penduduk miskin berdasarkan badan pusat statistik tahun 2020 naik menjadi 4,44 persen, dari sebelumnya tercatat sebesar 4,07 persen. Dengan angka kemiskinan sebesar 4,44 persen dari total jumlah penduduk, berarti ada sebanyak 38,77 ribu warga kota Malang yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019. (BPS Kota Malang, 2020)

**Tabel 1.1**  
**Presentase penduduk miskin di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia**

Rincian Wilayah	Presentase Penduduk Miskin di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia (Persen (%))		
	2018	2019	2020
Indonesia	9,82	9,41	9,78
Jawa Timur	10,98	10,37	11,09
Kota Malang	4,10	4,07	4,44

*Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*

Salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan adalah akibat dari adanya Corona Virus 2019 atau yang lebih dikenal dengan covid 19. Sebagaimana Badan Pusat Statistik menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,15 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini pemerintah harus memiliki berbagai cara yang strategis agar tidak bermunculnya masalah-masalah yang berkepanjangan dan dampak yang terjadi jika tidak segera ditangani. Masalah-masalah yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar adalah pengemis dan gelandangan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan keterbatasan pendidikan yang membuat anak-anak putus sekolah dan menjadi pengemis dan pengamen. Sering kita jumpai di lampu merah, terminal dan warung-warung pinggir jalan. Dengan begitu, pemerintah menyediakan berbagai macam program bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin agar

setidaknya dapat membantu keluar dari permasalahan tersebut dan menekan angka kemiskinan. Bantuan sosial (Bansos) ini dalam bentuk bantuan tunai maupun material. Bansos yang dimaksud antar lain seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain

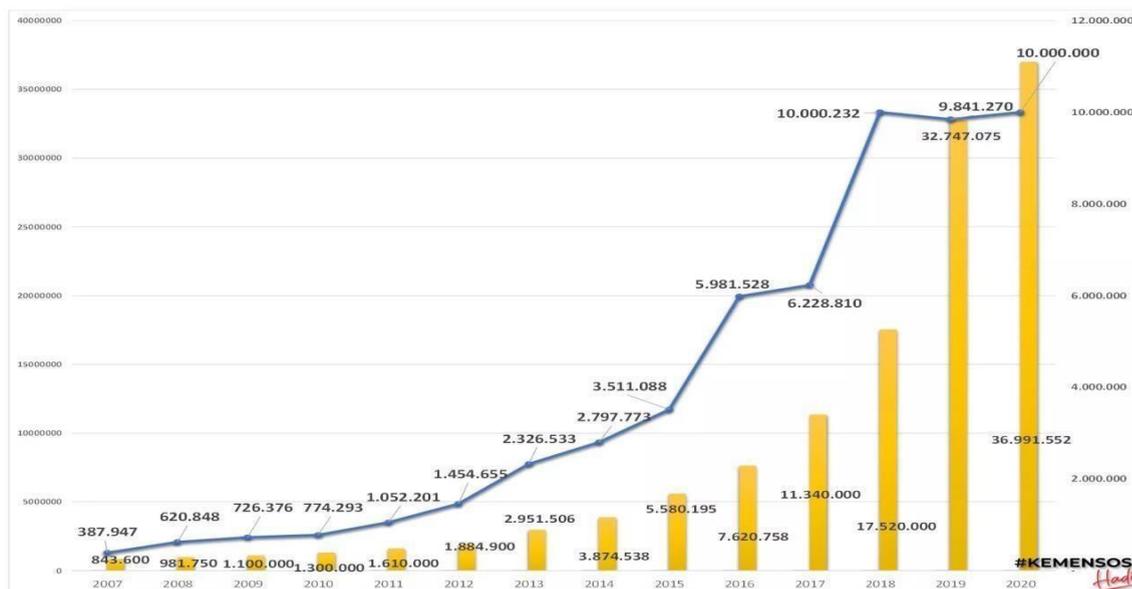
Program bantuan sosial merupakan kebijakan yang sangat penting di Indonesia, karena dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 telah di amanatkan bahwa negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, dalam pemahaman tersebut, kemiskinan adalah tanggungjawab dari negara terutama pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mempercepat pertumbuhan masyarakat agar lebih produktif dan sejahtera dengan kebijakan yang sudah ada.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH dan sudah berjalan selama 14 tahun memberikan solusi dalam memberantas kemiskinan. Program perlindungan sosial yang juga dikenal didunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut. Terutama masalah kemiskinan kronis. Mekanisme PKH dilaksanakan

mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH.

Program yang dikembangkan oleh pemerintah yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini masyarakat miskin melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang bekerjasama dengan bank penyalur, Bank Umum Milik Negara (BUMN). Sampai dengan tahun 2020, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan. Perkembangan jumlah penerima dan alokasi anggaran PKH sejak tahun 2007 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar 1.2

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan PKH Tahun 2007-2020**



Sumber : Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021

Pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2010-2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi anggaran PKH, melampaui baseline target perencanaan. Jumlah penerima PKH tahun 2016 adalah sebanyak 6 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp.10 triliun. Kemudian pada tahun 2017, KPM PKH meningkat menjadi 6.228.810 keluarga dengan anggaran bantuan sosial sebesar Rp. 11,5 triliun. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan target jumlah KPM PKH yang cukup signifikan menjadi 10 juta KPM dengan realisasi 10.000.232 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,4 triliun. Pada akhir 2019, terjadi penurunan jumlah KPM menjadi 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,2 triliun. Pada tahun 2020 capaian sebanyak 10.000.000 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9triliun.

Berdasarkan pedoman umum program keluarga harapan, untuk target penerima bantuan program keluarga harapan adalah rumah tangga sangat miskin. Penetapan untuk rumah tangga sangat miskin dilakukan dengan metodologi dan indikator yang transparan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi.

PKH dinilai memiliki peran terhadap peningkatan konsumsi dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga non-KPM PKH. Kesehatan ibu hamil dan anak juga menjadi perhatian khusus dalam PKH. Dukungan program bantuan tunai bersyarat PKH ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi masih menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pendidikan formal. Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka akan menghambat proses pendidikan. Bantuan PKH juga diberikan kepada peyandang disabilitas dan lanjut usia dalam keluarga. PKH membantu meringankan beban keluarga penerima manfaat yang mengampu lansia dan disabilitas.

Sementara itu, kota malang mendapatkan jatah atau kuota penerima bantuan sosial tunai sebanyak 22.718 jiwa. Jumlah itu berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 13.990 jiwa dan ditambahkan dengan data

non DTKS yang sebelumnya didatasendiri oleh pemerintah kota Malang sebanyak 8.728 jiwa. Para penerima bantuan mendapatkan pencairan bantuan yang berbeda. Untuk yang tidak memiliki bank umum milik negara (BUMN). Maka penerima bantuan akan mendapatkan bantuan melalui kantor pos. Total untuk penerima bantuan yang disalurkan melalui kantor pos dikota Malang mencapai 20.094 jiwa. (Sumber : malangtimes.com)

Dengan begitu, rincian penerima bantuan di kota malang antara lain yaitu dikecamatan Blimbing jumlah penerima manfaat sebanyak 4.073 jiwa, kecamatan Kedungkandang 2.966 jiwa, kecamatan Klojen 3.568 jiwa, kecamatan Lowokwaru 3,407 jiwa dan kecamatan Sukun 6.080 jiwa. Total keseluruhan untuk Kota Malang yang disalurkan melalui kantor pos senilai Rp. 12.056.400.000,- atau terinci Rp 600 ribu/jiwa/bulan untuk masa bantu selama tiga bulan. Sedangkan sisanya akan diterima melalui rekening masing-masing. Beberapa bank yang dimaksud adalah BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Masing-masing juga menerima bantuan yang sama sebesar Rp. 600 ribu selama tiga bulan, terhitung sejak april 2020 (Sumber: malangtimes.com)

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kelurahan Madyopuro Kota Malang)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Madyopuro Kota Malang ?

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Madyopuro Kota Malang dalam pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Madyopuro Kota Malang Dalam Pengentasan Kemiskinan?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Madyopuro Kota Malang dalam Pengentasan Kemiskinan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Madyopuro Kota Malang dalam pengentasan kemiskinan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan atau dapat menambah khazanah pengetahuan. Juga diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Menambah wawasan kepada penulis dan masyarakat umumnya terkait dengan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan.
- b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan program kebijakan, khususnya mengenai program-program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial sehingga mampu memberikan kebijakan yang berkesinambungan.